

**PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI PESISIR KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL BERBASIS *INTERCONNECTED GOVERNANCE***

***ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF GUNUNGGKIDUL
REGENCY BASED ON INTERCONNECTED GOVERNANCE***

Tito Satria Pinandito, Nurul Asfiani, Ainun Mardziah , Novarenda Pawestri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
titostr98@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan sosial masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kesenjangan yang paling kontras terlihat antara daerah perkotaan dan pesisir. Hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Myrdal, wilayah pesisir cenderung tertinggal karena jaraknya dari pusat kota. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa ada 35 daerah tertinggal yang tersebar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk daerah pesisir di Kabupaten Gunungkidul yang meliputi Kabupaten Panggang, Saptosari, Tanjungsari, dan Girisubo. Setelah melakukan pengamatan, peneliti menggunakan metode berpikir lintas dengan perbandingan. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mengambil poin-poin keunggulan yang telah berhasil diterapkan oleh suatu daerah yang kemudian titik-titik ini juga dapat diterapkan di daerah lain yang terbelakang. Berdasarkan uraian masing-masing parameter, penulis menetapkan Desa Ngloro sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai desa yang paling dirugikan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian para peneliti menetapkan Pulau Osipati sebagai wilayah perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran semua pemangku kepentingan, terutama sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, BAPPENAS memiliki porsi yang lebih besar dalam menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Karena itu, dalam upaya menyamakan pembangunan nasional, wilayah pesisir nusantara perlu mendapat perhatian.

Kata kunci: Wilayah pesisir, *benchmarking*, *dynamic governance*

Abstract

Social inequality is still a phenomenon that occurs in various regions in Indonesia. The most contrasting gap is seen between urban and coastal areas. Almost the same as the theory put forward by Myrdal, coastal areas tend to be left behind because of their distance from the city center. Based on observations

made, it was found that there were 35 disadvantaged areas scattered in the Special Province of Yogyakarta, including coastal areas in Gunungkidul Regency which included Panggang, Saptosari, Tanjungsari, and Girisubo Districts. After making observations, researchers used the thinking across method by benchmarking. The purpose of using this method is to take the points of excellence that have been successfully applied by an area which then these points can also be applied in other regions that are backward. Based on the description of each parameter, the authors set Ngloro Village as the location of the study because it is considered as the most disadvantaged village compared to the others. Then the researchers set Osi Island as a comparison region. The results of the study are that the role of all stakeholders, especially as an institution of national development planning, BAPPENAS has a greater portion in preparing long and medium term development plans. Therefore, in an effort to equalize national development, the coastal areas of the archipelago need attention.

Keywords: coastal areas, benchmarking, dynamic governance

A. Pendahuluan

Kesenjangan sosial masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kesenjangan tersebut timbul dari berbagai permasalahan yang akhirnya memunculkan istilah wilayah maju dan wilayah tertinggal. Keadaan ini muncul karena sebagian wilayah memiliki potensi ekonomi tinggi serta mampu mengelola dengan baik, sedangkan sebagian wilayah lainnya memiliki potensi ekonomi yang rendah ditambah lagi kesulitan dalam hal pengelolaannya. Hal inilah yang semakin mempertajam kesenjangan yang ada. Kemungkinan lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah adalah seperti dalam teori Gunnar Myrdal tentang *backwash effect* dan *spread effect*. Dalam teorinya, Myrdal menjelaskan bahwa satu wilayah yang mulai tumbuh akan menyebabkan *stakeholder* dari wilayah

lain tertarik ke dalam wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sehingga wilayah pinggiran akan semakin tertinggal (Soetrisno,1992).

Kesenjangan yang paling kontras terlihat antara wilayah perkotaan dan wilayah pesisir. Hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Myrdal, wilayah pesisir cenderung akan menjadi wilayah tertinggal karena jaraknya yang jauh dari pusat kota. Kurangnya aksesibilitas warga juga menjadikan wilayah pesisir dianggap terbelakang. Padahal, jika ditinjau lebih mendalam wilayah pesisir memiliki potensi cukup besar mulai dari pesona wisata pulau-pulau kecil yang beraneka ragam, ketersediaan bahan pangan dan kegiatan industri terutama hasil laut dan perikanan dimana semua kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan (*backward and forward linkage*) kuat dengan industri-industri lainnya.

Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pembangunan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional ke-X. Mengingat permasalahan tentang kesenjangan sosial selalu ada dan terus berkembang di setiap periode pemerintahan yang berkuasa. Solusi yang diimplementasikan juga merupakan pengembangan wilayah tertinggal dari bongkar pasang konsep sebelumnya yang telah diujiterapkan. Pengembangan wilayah yang dilakukan seharusnya lebih bersifat holistik dan komprehensif dengan memberdayakan seluruh potensi dan kontribusi dari masing-masing aktor. Selain itu, pengembangan wilayah tertinggal mampu dilakukan dengan metode adaptasi atau perbandingan dengan wilayah lain yang mungkin mengalami permasalahan yang sama. Konsep ini menggunakan langkah *thinking across* dengan melakukan sikap *benchmarking*. Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk mengambil poin-poin keunggulan yang sudah berhasil diterapkan oleh suatu wilayah yang kemudian poin-poin tersebut juga mampu diterapkan di wilayah lain yang terbelakang.

Berdasarkan observasi dan studi pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan data bahwa terdapat 35 wilayah tertinggal yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul yang meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Tanjungsari, dan Girisubo. Beberapa

parameter yang digunakan dalam pengklasifikasian wilayah maju dan tertinggal didasarkan pada beberapa aspek, diantaranya: faktor aksesibilitas, sosial ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan. Kemudian penulis mencoba mengerucutkan lagi wilayah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan, maka daerah yang memenuhi sebagai kategori wilayah tertinggal adalah Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan, wilayah yang akan menjadi objek perbandingan adalah Pulau Os, Maluku. Pulau Os memiliki kondisi wilayah yang hampir mirip dengan pesisir Gunungkidul. Namun, Pulau Os mampu tampil menjadi wilayah pesisir yang maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang mereka miliki.

Kondisi yang dialami oleh Desa Ngloro maupun Pulau Os ini sangat mungkin juga dialami oleh daerah lain di perbatasan pulau-pulau Indonesia Dengan konsep *benchmarking*, nantinya solusi yang dihasilkan mampu menjadi rekomendasi bagi BAPPENAS sebagai salah satu badan yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui perbandingan kondisi antara pesisir Gunungkidul dan Pulau Os
- b. Mengetahui langkah strategis dan pola *benchmarking* yang bisa diadopsi dari Pulau Os dan

diterapkan di pesisir
Gunungkidul

B. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Semiawan (2010) mengatakan metode ini menekankan pada proses melihat fakta, realita, gejala, dan peristiwa yang terjadi dan dialami. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan terkait data potensi ekonomi dan pengelolaan daerah pesisir di Pulau Osid dan pesisir Gunungkidul. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh suatu pokok permasalahan kemudian penulis memberikan solusi pemecahan dari permasalahan yang ada. Selain itu, penulisan dilakukan dengan melakukan konsep *thinking across* atau dengan melakukan perbandingan dari beberapa parameter yang digunakan untuk menganalisis potensi kedua wilayah yang dibandingkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli-Agustus 2019.

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui tiga sumber, yakni: (1) Data Personal, yaitu dari pihak yang memiliki kapabilitas untuk memberikan keterangan valid mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Ngloro. Oleh karena itu, data personal diambil dari data lisan Kepala Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Winaryo, SH, MSi),

Kepala Desa Desa Ngloro (Heri Yuliyanto) serta beberapa penduduk Desa Ngloro (2) Data Place, yaitu meliputi hasil observasi lokasi serta situasi daerah penelitian yaitu di sekitar Desa Ngloro (3) Data Paper, yaitu dokumen laporan penelitian yang diperoleh dari jurnal, bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan terkait pengelolaan wilayah tertinggal, terutama daerah pesisir. Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang akurat, dengan beberapa cara, meliputi: wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan studi litelatur.

C. Pembahasan

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta, dimana kabupaten ini berpusat di Kecamatan Wonosari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485 km² yang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa. Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Salah satu hal menarik dari Kabupaten Gunungkidul yaitu memiliki panjang pantai yang cukup luas yang terletak di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Hal inilah yang menyebabkan potensi hasil laut dan

wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan.

Selain potensi sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki sumber daya manusia yang memadai. Pasalnya, kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 berjumlah 680.406 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 328.878 jiwa dan perempuan sebanyak 351.528 jiwa.

Berdasarkan dua parameter di atas, seharusnya Gunungkidul sangat berpeluang untuk menjadi kabupaten yang maju dan mandiri. Namun, pada kenyataannya 40% dari seluruh bagian di Kabupaten Gunungkidul termasuk ke dalam wilayah tertinggal. Wilayah tersebut tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, diantaranya Kecamatan Panggang, Saptosari, Tanjungsari, dan Girisubo. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Saptosari tercatat sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah yakni dengan status kesejahteraan penduduknya hanya 67,47 persen. (BPS Kab. Gunungkidul, 2018).

Kecamatan Saptosari merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 7 desa yaitu desa Krambilsawit, Kanigoro, Planjan, Monggol, Kepek,

Ngloro, dan Jetis. Jarak desa terjauh dari ibukota kabupaten yaitu Desa Planjan dan Desa Krambilsawit. Jarak desa Planjan ke ibukota sejauh 26,2 km, sedangkan jarak Desa Krambilsawit ke ibukota yaitu sejauh 25,1 km. Kecamatan Saptosari sendiri memiliki luas wilayah 87,83km² dengan desa terluas adalah Desa Kanigoro. Untuk penggunaan lahan terluas di Kecamatan Saptosari yaitu terdapat pada penggunaan tanah kering yaitu sebesar 6.950 Ha, disusul dengan penggunaan bangunan sebesar 832 Ha, penggunaan hutan rakyat sebesar 755 Ha, sedangkan paling sedikit digunakan untuk penggunaan lahan lainnya yaitu seluas 246Ha. (Saptosari dalam Angka, 2018).

Pembagian Desa menurut Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Saptosari, 7 desa yang terdapat di Kecamatan Saptosari 5 diantaranya masuk ke dalam kategori wilayah tertinggal, yaitu Desa Krambilsawit, Kanigoro, Planjan, Monggol dan Ngloro. Untuk menentukan fokus wilayah penelitian, penulis menetapkan beberapa parameter, diantaranya: faktor pendidikan, sosial ekonomi, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan faktor pendidikan, pada tahun 2017 tercatat di Kecamatan Saptosari terdapat sejumlah 2.877 orang murid tingkat SD, murid tingkat SLTP sebanyak 1.348 orang dan murid tingkat SLTA sebanyak 808. Adapun jumlah guru di kecamatan ini, tercatat 230 orang guru tingkat SD, 107 orang

guru tingkat SLTP dan 69 orang guru tingkat SLTA.

Kemudian dari faktor sosial ekonomi, salah satu desa dengan jumlah ternak rendah adalah Desa Ngloro, yaitu hanya 1.420 ekor hewan ternak berkaki empat. Sedangkan untuk unggas, hanya mencapai 5.342 ekor. Selain itu APBDes yang dimiliki oleh Desa Ngloro juga termasuk rendah dibandingkan desa yang lain, yaitu hanya mencapai 1.038,11 juta. Hal ini sangat tidak seimbang dengan pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Ngloro, yaitu mencapai 1.726,52 juta. Berdasarkan uraian dari masing-masing parameter, maka penulis menetapkan Desa Ngloro sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai desa paling tertinggal dibandingkan yang lain. Setelah menetapkan lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menentukan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik yang sama, akan tetapi mampu mengelolanya dengan baik sehingga layak untuk menjadi acuan perbandingan. Oleh karena itu, penulis memilih Pulau Osi sebagai wilayah percontohan.

Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Meskipun demikian, Kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya yang besar yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata yang dapat membantu PAD Kabupaten

Seram Bagian Barat. Pulau Osi misalnya. Pulau yang berada di sebelah barat Pulau Seram ini, merupakan salah satu destinasi unggulan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pulau Osi menawarkan keindahan lautan serta suasana yang tenang.

Pulau Osi saat ini mengalami perluasan makna yang bukan hanya merujuk pada Pulau Osi induk, tapi juga pulau-pulau sekitarnya antara lain Pulau Tatobalambunte, Tatobalasangke, Tatobosurati, dan Tatobobensin. Pengelolaan Pulau Osi saat ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang mendiami Pulau Osi yang seratus persen merupakan Etnis Buton dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Etnis Buton dikenal sebagai etnis dengan kebudayaan bahari yang kuat (Hidayah, 2015). Etnis ini berada di Kepulauan Maluku diperkirakan sejak tahun 1600-an (Makmun, 2011; Rabani, 2010; Koentjaraningrat, 2011; Blair & Blair, 2012). Pengelolaan secara swadaya memiliki keuntungan karena dijalankan oleh masyarakat secara utuh sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung.

Ekosistem di Pulau Osi terdiri atas mangrove, padang lamun, dan pantai berbatu. Potensi sumberdaya *landscape* yang besar yang dapat membantu PAD Kabupaten Seram Bagian Barat. Di Pulau Osi juga terdapat ekosistem mangrove. Luas ekosistem mangrove pada lanskap Pulau Osi seluas 6.465.600 m². Secara ekologi dan ekonomi, ekosistem mangrove memiliki fungsi yang sangat

penting untuk masyarakat lokal, regional, nasional, maupun global. Ekosistem mangrove berperan sebagai pelindung dan penahan pantai, penghasil bahan organik, habitat fauna, pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran, obat-obatan, sumber bahan baku industri, kawasan pariwisata, pendidikan, penelitian, dan konservasi. Untuk itu, dibutuhkan penataan dan perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya alam mangrove (Fahriansyah & Yoswaty, 2012; Saparinto, 2007).

Ekosistem selanjutnya adalah padang lamun. Keberadaan ekosistem ini sering diabaikan. Padahal ekosistem padang lamun memiliki konektivitas dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Menurut Bortone (2000), padang lamun merupakan ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh vegetasi lamun. Padang lamun memiliki peran penting dalam ekologi kawasan pesisir sebab menjadi habitat berbagai biota laut termasuk menjadi tempat mencari makan (*Feeding ground*) bagi dugong, penyu hijau, ikan, Echinodermata, dan gastropoda (Bortone, 2000). Selain sebagai *feeding ground*, padang lamun juga menjadi habitat potensial bagi komunitas ikan untuk berlindung dan memijah beberapa jenis ikan. Hal ini disebabkan oleh massa daun lamun dapat menurunkan pencahayaan matahari di siang hari, melindungi dasar perairan dan memungkinkan pengembangan lingkungan mikro pada dasar vegetasi (Aswandy dan Azkab, 2000).

Gillanders (2006) menyatakan sejumlah spesies ikan ekonomis penting menghabiskan sebagian siklus hidup dan sepanjang hidupnya pada ekosistem padang lamun. Selanjutnya, pada padang lamun juga ditemukan spesies non-komersial sehingga membentuk kompleksitas hubungan trofik. Peranan padang lamun terhadap keberadaan ikan terutama yang bernilai ekonomis penting. Sudah sering dilaporkan. Rappe (2010) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa nilai indeks keanekaragaman komunitas ikan ditemukan lebih tinggi pada padang lamun dibandingkan pada padang lamun jarang dan hanya terdiri dari satu spesies. Keberadaan epifit sebagai nutrisi bagi ikan yang hidup di padang lamun dapat berkontribusi terhadap hasil yang dicapat (Rappe, 2010).peristiwady (1992) sebelumnya telah membuktikan bahwa erdapat 79, 39% dominasi sepuluh ikan penting pada habitat lamun di Pulau Osi.

Aktivitas ekonomi Indonesia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah Maluku pada prinsipnya merupakan aktivitas bisnis di daerah pedesaan, aktivitasnya berhubungan dengan berbagai aspek internal (dengan kecenderungan keterbatasan) misalnya, modal usaha, sumberdaya manusia, ketrampilan manajerial, kemampuan inovasi, adopsi teknologi, kapasitas produksi. Namun unit-unit usaha mikro dan usaha kecil di wilayah di Pulau Osi masih beraktivitas dan dapat bertahan serta mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemilik maupun masyarakat sekitar, dan beberapa unit

usaha telah berkembang menjadi usaha menengah. Kondisi tersebut meragukan asumsi bahwa aktivitas bisnis usaha mikro dan usaha di wilayah pedesaan atau di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung tidak profitable dan memiliki potensi pengembangan yang lemah, serta relatif belum bisa dijustifikasi secara general.

Wilayah Dusun Pulau Osi merupakan daerah pedesaan dengan ciri pulau pulau dan relatif jauh dari pusat kota. Unit-unit usaha di Dusun Pulau Osi merupakan usaha tambak, usaha penginapan di atas laut, usaha restoran dan usaha kios. Berdasarkan wilayah, dan jarak dapat dikatakan bahwa usaha usaha tersebut memiliki kelemahan yakni kelemahan infrastruktur, akses atau informasi kepada konsumen yang terbatas, kondisi ini merupakan penghalang keberhasilan dan kemajuan usaha.

Namun saat ini minat konsumen Unit-unit usaha di Dusun Pulau Osi sangat tinggi, jumlah pelanggan penginapan di kedua Dusun tersebut semakin hari semakin bertambah, hal ini mengisyaratkan bahwa Unit-unit usaha di Dusun Pulau Osi walaupun memiliki keterbatasan namun mencapai keberhasilan yang baik. Sebagai bantuan penunjang keberhasilan dan kemajuan usaha dari UMKM selalu hadir dalam setiap proses permintaan barang oleh masyarakat Dusun Pulau Osi dimana sebagai pemasok barang sebagai persediaan untuk usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat setempat. UMKM juga menjangkau

sampai di wilayah pesisir sehingga masyarakat di Dusun Pulau Osi tidak pernah khawatir akan usaha yang dijalankan dengan persediaan barang yang diinginkan oleh konsumen.

Aktivitas bisnis di wilayah pedesaan/wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki prospek yang baik, sebagai contoh, beberapa bisnis membutuhkan input yang hanya dapat ditemukan di pedesaan, baik dalam produksi maupun dalam bauran pemasaran, seperti usaha berbasis kerajinan, hasil pertanian, perikanan dan pariwisata. Sebagai pelaku bisnis, wirausaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Osi merupakan orang yang *action oriented*, walaupun dihadapkan pada kondisi alam, mereka tidak minim aksi, tidak hanya bermimpi atau pasrah pada kondisi, mereka selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif guna mendukung keberhasilan usaha.

Wirausaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat mampu membangun jaringan bisnis antar pulau yang menjamin mekanisme permintaan dan penawaran yang baik. Wirausaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Osi dalam kondisi apapun selalu menjaga kesanggupan berpikir positif, kreatif, bertindak inovatif secara detail terhadap hal-hal penting terkait aktivitas usaha. Wirausaha di Pulau Osi memiliki ketahanan mental, merespon secara positif potensi resiko, wirausaha di Pulau Osi, Kabupaten Seram Bagian Barat selalu siap menanggung resiko apapun atas aktivitasnya, namun

secepat itu pula, dia akan berbenah diri dan beraktivitas lebih baik. Ketahanan mental dan perilaku yang dimiliki oleh wirausaha di wilayah Pulau Osi, Kabupaten Seram Bagian Barat, berpotensi menguatkan keberhasilan usaha.

Walaupun usaha mikro dan usaha kecil di wilayah Pulau Osi Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki keterbatasan sumberdaya dan lingkungan bisnis yang beresiko, bersifat non formal serta daya dukung yang terbatas namun mampu mendayagunakan sumber daya organisasi yang terbatas dan dapat meningkatkan keberhasilan usaha. Salah satu gambaran keberhasilan bisnis di wilayah Pulau Osi dan Dusun Pelita Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bervariasinya unit usaha antara lain: sebagai penyedia akomodasi, penyediaan makan minum, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, jasa reparasi dan perbengkelan, usaha persewaan dan jasa perusahaan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah Pulau Osi mampu mengoptimalkan kemampuan bisnis, walaupun di wilayah pedesaan. Kemampuan ini dipandang sebagai orientasi startegik yang menggambarkan kemampuan dinamis yang dimiliki oleh usaha mikro dan usaha kecil di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah Pulau Osi, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengintegrasikan dan membangun kompetensi internal dan eksternal. Orientasi startegik diasumsikan sebagai pendorong

peningkatkan sumber daya organisasi melalui pengintegrasian dan membangun kompetensi internal dan eksternal. Keberhasilan yang diraih oleh Pulau Osi tidak terlepas dari peran berbagai aktor, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta.

D. Penutup

Simpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah strategi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di Pulau Osi telah mampu mendukung pembangunan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Seram Barat. Masyarakat di Pulau Osi tidak tergantung dengan wilayah Piru yang menjadi ibukota Kabupaten Seram Barat dan Ambon. Pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan membawa kemandirian bagi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan.

Potensi alam didukung dengan pendampingan masyarakat oleh Pemerintah setempat dengan pola *benchmarking* memberikan kontribusi nyata. Pola *benchmarking* tersebut tidak hanya memberikan penyuluhan di awal, tetapi mendampingi masyarakat di setiap tahap mulai dari awal hingga akhir. Meskipun masyarakat sudah mampu menghidupi dirinya sendiri tetapi pemerintah setempat tetap memantau dan memberikan evaluasi. Disini peran pemerintah lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.

Dari apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah di Pulau

Osi dapat menjadi tolok ukur untuk wilayah pesisir lain di wilayah Indonesia. Kabupaten Gunungkidul dengan segala kebutuhannya perlu untuk mengembangkan pembangunan masyarakat berbasis benchmarking. Memiliki kondisi geografis yang sama dengan Pulau Osi yaitu wilayah pesisir dengan potensi wisata, pertanian, dan hasil perikanan, Kabupaten Gunungkidul dapat mengadopsi pembangunan di pulau Osi. Disisi lain, karena berada di pulau Jawa yang mana aksesibilitas masyarakat dan pemerintah lebih mudah seharusnya mudah bagi Kabupaten Gunungkidul untuk mengimplementasi pola interconnected governance.

Setelah menarik kesimpulan, maka beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan bagi beberapa *stakeholder* adalah sebagai berikut:

1. Bappenas:

Sebagai intitusi perencanaan pembangunan nasional, BAPPENAS mempunyai porsi lebih dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Oleh karena itu, dalam upaya pemerataan pembangunan nasional, wilayah pesisir nusantara perlu mendapat perhatian. Meskipun saat ini digalakkan desa wisata, namun tidak selamanya kondisi wilayah satu dengan yang lain itu sama. Perlu pendampingan khusus bagi wilayah pesisir.

Benchmarking bisa dijadikan agenda bagi BAPPENAS dalam rencana pembangunan wilayah pesisir. Pola ini perlu diterapkan mengingat dampak *backwash* dan *spread effect* menyebabkan ekonomi wilayah pesisir sulit berkembang. Kegiatan *benchmarking* yang bisa diterapkan yaitu berupa pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dengan membentuk panduan dan mandatori pembentukan tim *benchmarking* kepada pemerintah daerah.

2. Pemerintah Daerah Setempat:

Dengan kewajiban menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pembangunan lokal. Pada studi ini, rekomendasi ditujukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Rekomendasi yang diberikan adalah usulan pembentukan tim *benchmarking* untuk wilayah pesisir. Tidak selamanya wisata pantai akan menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Masyarakat perlu pendampingan dalam menentukan sumber ekonomi baru yang memiliki jangka panjang. Pembentukan UMKM dengan potensi lokal perlu digalakkan. Tidak hanya pasif mengandalkan pengunjung pantai sebagai sumber pendapatan, tetapi masyarakat perlu dikenalkan dengan usaha bisnis yaitu UMKM dengan berbasis teknologi.

Lalu perlunya pembangunan akses transportasi yang mempermudah aksesibilitas antara wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan pusat kota yaitu Yogyakarta. Infrastruktur transportasi yang dibuat haruslah untuk transportasi massal yang bisa menampung arus kendaraan lebih banyak dan lebih cepat. Sehingga ke depannya tidak menyebabkan permasalahan klasik yaitu kemacetan. Dalam mewujudkannya perlu kerjasama dengan pihak swasta sebagai operator.

3. Pihak Swasta dan Masyarakat:

Pembangunan masyarakat pesisir memerlukan modal yang tidak sedikit. Perlu bantuan pihak swasta disini dalam melengkapi pembangunan. Pemerintah sebagai fasilitator sedangkan pihak swasta sebagai operator. Untuk itu dibutuhkan perusahaan di bidang transportasi seperti PT Trans Tugu Jogja untuk mengekspansi mobilitasnya serta perusahaan transportasi daring.

Perusahaan jasa wisata baik konvensional maupun daring untuk mendukung wisata lokal di Gunungkidul. Dengan kemajuan teknologi, segala potensi di wilayah Gunungkidul mulai dari wisata alam, budaya, dan keanekaragaman hayati serta kuliner perlu dikenalkan kepada publik luas. Pembangunan ini tentunya juga tidak hanya

tergantungan pada pemerintah dan swasta tetapi dibutuhkan juga peran aktif masyarakat. Masyarakat menjadi kunci dalam upaya *benchmarking*, segala usaha yang direncanakan tergantung dari kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta kondisi wilayah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F. (2015). Kondisi hutan mangrove Teluk Piru, Seram Barat, Maluku. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 7, 731 – 743.
- Arifin & Jompa, J. (2005). Studi kondisi dan potensi ekosistem padang lumun sebagai daerah asuhan biota laut. *Jurnal Ilmu – Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 12, 73 -79.
- Aswandy, I dan M.H.Azkab. (2000). Hubungan fauna dengan padang lamun, *Oseana*, 25, 19 – 24.
- Gillanders , B.M. (2006). Seagrasses, fish and fisheriers. In : Larkum, A.W.D., Orth, R. J. & Duarte, C.M. (eds). *Seagrasses : Biology, Ecology and Conservation* (Hlm. 503 – 530). Netherland Springer.
- Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahadat, Ray March. (2016). Potensi dan Permasalahan Lanskap Pulau Osi sebagai Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Conference Paper. Prosiding
Temu Ilmiah IPLBI.